



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang : 2018 – 2019  
Masa Sidang : I  
Rapat : Ke -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/Tanggal : Kamis, 6 September 2018  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 14.00 WIB s.d 18.20 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),  
Gedung Nusantara DPR RI.  
Acara : Membahas RKA-K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat dalam nota Keuangan RAPBN TA 2019  
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA  
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi  
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta  
jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah membahas RKA-K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019.
3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap alokasi anggaran dalam RAPBN TA 2019 sebagai berikut:

*Dalam Ribu Rupiah*

KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2019	KEKURANGAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	138.363.546.044	110.731.599.735 <sup>*)</sup>	(27.631.946.309)

<sup>\*)</sup> Selain itu terdapat pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha – *Availability Payment* (KPBU-AP) pada Kementerian PUPR sebesar Rp.5,103 triliun

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat untuk mencari solusi penyelesaian lebih lanjut terhadap penanganan ganti rugi korban di peta area terdampak akibat bencana semburan lumpur Sidoarjo.
3. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten/kota tertentu, akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO

Jakarta, 6 September 2018

KETUA RAPAT,



FARY DJEMY FRANCIS